

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT  
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK KANTOR CABANG  
UTAMA SURABAYA**

**TUGAS AKHIR**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma Tiga Jurusan  
Perbankan Dan Keuangan



Oleh :

**RAHMAT JERI**

**NIM : 2016110485**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
S U R A B A Y A  
2019**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rahmat Jeri  
Tempat, tanggal lahir : Luwuk, 03 Juli 1998  
N.I.M : 2016110485  
Program Studi : Perbankan dan Keuangan  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA  
PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK  
KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA

**Disetujui dan Diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,

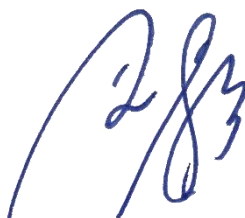
Tanggal : 05 September 2019



**(Drs. Sudjarno Eko Supriyono M.M)**  
**NIDN. 0726045503**

Ketua Program Studi Diploma 3,

Tanggal : 05 September 2019



**(Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak)**

# **THE IMPLEMENTATION OF WORKING CAPITAL LOAN AT PT BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK MAIN BRANCH SURABAYA**

**RAHMAT JERI**

**2016110485**

**[2016110485@students.perbanas.ac.id](mailto:2016110485@students.perbanas.ac.id)**

**STIE Perbanas Surabaya**

## **ABSTRACT**

The need for funds from the community is increasing, both for daily needs or for business needs, one of the solutions to these problems is the use loan. There are many types of loans offered by banks, one of which is working capital loan that serves to finance the need for working capital for a business. This research study about how the implementation of working capital loans at PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Main Branch Surabaya using descriptive method. From the research there are many requirements and conditions that must be fulfilled by debtors and have to through many processes so that the loans are given appropriate. In the process there are several obstacles that require special attention to prevent risks that will be detrimental.

**Keywords : Implementation, Working Capital Loans, Bank BTN Main Branch Surabaya**

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat saat ini tidak bisa lepas akan kebutuhan terhadap dana, baik untuk memenuhi kebutuhan harian, pembiayaan untuk kesehatan, membuka atau memperluas usaha, pemenuhan akan fasilitas dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut mereka bekerja dan berupaya agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang selalu meningkat seiring waktu membuat kita harus berpikir bagaimana cara bertahan dan ikut berkembang bersama dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, seperti seorang yang dapat memenuhi kebutuhan akan dirinya sendiri dengan dengan penghasilannya saat ini tetapi akan berbeda begitu dia memiliki keluarga dan tanggungan lainnya maka kebutuhannya pun akan meningkat dan ia harus meningkatkan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat tentu melakukan usaha yang sama tidak akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Agar dapat memenuhi

kebutuhan yang terus meningkat maka seseorang harus mau berkembang dan melakukan peningkatan usaha seperti bekerja lebih keras, memperbanyak usaha, mencari peluang dan hal lainnya yang dapat meningkatkan penghasilan.

Untuk melakukan peningkatan tentu dibutuhkan dana juga. Seperti seorang pengusaha, guna untuk mendapatkan peningkatan penghasilan maka ia harus meningkatkan usahanya, seperti membanyak mesin, meningkatkan produktivitasnya, menambah tenaga dan hal lainnya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan peningkatan penghasilan.

Untuk mendapatkan tambahan dana guna meningkatkan penghasilan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mencari investor dengan menjual saham ataupun menerbitkan obligasi atau mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank agar mendapatkan tambahan dana untuk meningkatkan usaha.

Menurut Kasmir (2016 : 3) menyatakan Bank adalah lembaga

keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Salah satu bentuk penyaluran dana tersebut ialah berupa kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha guna menambah modal usahanya untuk peningkatan usaha.

UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dengan kata lain kredit merupakan suatu perjanjian antara peminjam dana dan Bank dimana Bank akan memberikan pinjaman dana kepada peminjam dan peminjam harus mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu dan bunga yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan pentingnya untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh bank untuk nasabah maka disusunlah Laporan Tugas Akhir dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Bank**

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu "banca" yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pemberian jasa dan layanan mengenai keuangan baik

menyimpan maupun memberikan pinjaman uang.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014 : 14), mendefinisikan Bank adalah "Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya".

Sedangkan menurut A.Abdurahmandalam Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2013:2), "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang memberikan jasa dan layanan keuangan kepada masyarakat yang kegiatan utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

### **Fungsi Dan Tujuan Bank**

Menurut Kasmir (2014 : 4) terdapat tiga fungsi utama Bank, tiga fungsi tersebut diantaranya :

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat  
Bank akan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, Bank akan menghimpun dana tersebut dalam bentuk simpanan dan menjamin keamanannya serta Bank

juga menawarkan imbalan yang bergantung dari besarnya dana yang disimpan.

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat  
Bank akan menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, dari kegiatan menyalurkan dana tersebut Bank akan memperoleh pendapatan dari dana yang telah disalurkanannya kepada masyarakat dalam bentuk bunga.
3. Pelayanan Jasa Perbankan  
Fungsi ketiga Bank ialah memberikan pelayanan jasa perbankan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangannya. Dari kegiatan tersebut Bank memperoleh pendapatan atas jasa yang telah diberikan.

Sedangkan tujuan perbankan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dalam pasal 4 bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

### **Jenis-Jenis Bank**

Bank terbagi dalam berbagai macam jenis yang dapat ditinjau dari berbagai sisi, meski demikian kegiatan utama masing-masing Bank tetaplah sama ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Adapun jenis-jenis Bank tersebut ialah :

#### **1) Bank sentral**

Bank Sentral adalah bank yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur serta mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Sesuai dengan namanya (Bank Sentral atau Bank Pusat) maka hanya ada satu bank sentral di suatu

negara. Di Indonesia, kedudukan bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Sedang di Amerika, bank sentral dipegang oleh Federal Reserves System di Inggris dipegang oleh Bank of England.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut undang-undang itu juga, tujuan didirikannya Bank Indonesia adalah untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi. Adapun kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, dapat dilihat dari perkembangan nilai tukar rupiah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.  
Penjelasan dan pengertian tentang kebijakan moneter serta macam-macam kebijakan moneter akan dibahas di bagian selanjutnya bab ini.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.  
Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran.
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin usaha bank, melaksanakan pengawasan serta memberi sanksi bagi bank yang melanggar peraturan.

2) Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, serta memberikan jasa pelayanan di bidang keuangan.

Dikatakan umum karena memberikan jasa kepada masyarakat umum, dan dapat beroperasi di seluruh wilayah. Usaha-usaha yang bisa dilakukan bank umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat, berupa tabungan biasa, deposito dan lain-lain.
2. Memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat.
3. Melakukan jasa pengiriman uang.
4. Melakukan inkaso antarbank.
5. Melakukan jual beli surat-surat berharga, seperti wesel dan kertas perbendaharaan negara.
6. Menerima titipan barang-barang berharga.
7. Melakukan kegiatan-kegiatan perbankan lainnya yang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dengan demikian, usaha yang bisa dilakukan BPR lebih sedikit atau lebih sempit dibandingkan bank umum.

Adapun usaha-usaha yang bisa dilakukan BPR adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

tabungan, deposito dan bentuk lain yang sama dengan itu.

2. Memberikan pinjaman (kredit).
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain

BPR dilarang melakukan usaha-usaha berikut:

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, seperti transfer dan kliring.
3. Melakukan kegiatan usaha valuta asing
4. Melakukan penyertaan modal
5. Melakukan usaha asuransi.

Contoh BPR di antaranya adalah Bank Desa, Bank Kredit Desa (BKD) dan Bank Pasar.

**Kegiatan Usaha**

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
6. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
7. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

8. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
9. Obligasi.
10. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
11. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
12. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
13. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
14. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
16. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
17. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
18. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
19. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
20. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
21. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Kredit**

### **Pengertian Kredit**

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

### **Tujuan Kredit**

Kredit memiliki beberapa tujuan dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima
2. Memproduksi dan memanfaatkan dana-dana yang ada
3. Menjalankan pada kegiatan operasional bank
4. Menambah modal kerja di perusahaan
5. Mempercepat lalu lintas pembayaran
6. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat

### **Fungsi Kredit**

Kredit memiliki berbagai fungsi. Fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Uang yang hanya disimpan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menghaikan sesuatu yang bermanfaat melalui kredit.
3. Meningkatkan peredaran uang
4. Dari kredit yang diberikan, uang akan beredar dari melalui suatu wilayah menuju wilayah lainnya. Suatu wilayah yang mengalami kekurangan uang akan menerima dana dari wilayah lainnya melalui kredit
5. Meningkatkan daya guna barang
6. Dana yang diterima oleh penerima kredit dapat digunakan untuk mengolah suatu benda agar dapat memberikan manfaat ataupun meningkatkan nilainya.
7. Meningkatkan beredarnya barang



8. Kredit dapat meningkatkan peredaran barang dari wilayah satu ke wilayah lainnya.
9. Sebagai alat stabilitas ekonomi
10. Kredit membantu menstabilkan ekonomi dengan menyalurkan dana kepada masyarakat guna memperbaiki atau meningkatkan usahanya.
11. Meningkatkan keinginan berusaha
12. Dengan adanya kredit akan membantu penerima kredit yang ingin memperbaiki ataupun meningkatkan usahanya.
13. Meningkatkan pemerataan pendapatan
14. Dengan diberikannya kredit maka penerima kredit yang membutuhkan dana dapat meningkatkan usahanya agar dapat meningkatkan pendapatannya.
15. Meningkatkan hubungan Internasional
16. Kredit yang dimaksud adalah pinjaman internasional, dengan terjadinya kredit antar suatu negara dan negara lainnya maka akan meningkatkan juga kerja sama antar negara tersebut.

### **Manfaat Kredit**

Kredit memiliki beberapa manfaat yang dapat dilihat dari berbagai sektor antara lain sebagai berikut.

1. Debitur
  - 1) Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi
  - 2) Kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani
  - 3) Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya
  - 4) Rahasia keuangan debitur terlindungi
  - 5) Beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur
2. Pemerintah
  - 1) Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum
  - 2) Sebagai pengendali kegiatan moneter

- 3) Untuk menciptakan lapangan usaha
- 4) Dapat meningkatkan pendapatan negara
- 5) Untuk menciptakan dan memperluas pasar
3. Bank
  - 1) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank
  - 2) Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya
  - 3) Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur
  - 4) Dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat
  - 5) Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan
4. Masyarakat
  - 1) Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian
  - 2) Mampu mengurangi tingkat pengangguran
  - 3) Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank
  - 4) Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat

### **Unsur-Unsur Kredit**

Berikut merupakan unsur-unsur yang terdapat didalam kredit, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepercayaan
 

Dalam proses pemberian kredit Bank harus terlebih dahulu mengetahui calon debiturnya dengan baik, calon debitur harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Bank agar mendapatkan kepercayaan Bank dalam memberikan kreditnya.
2. Kesepakatan
 

Untuk mengikat kedua belah pihak maka diperlukan sebuah kesepakatan antar dua pihak berupa perjanjian dimana kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya.
3. Jangka Waktu
 

Didalam perjanjian kredit terdapat jangka waktu, dimana jangka waktu ini



merupakan batas waktu pemenuhan kewajiban yang terdapat pada perjanjian tersebut.

4. Risiko

Unsur risiko merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit, Bank harus memperkirakan segala risiko yang akan terjadi kedepannya dan menyipkan langkah pencegahannya seperti memperhitungkan jaminan yang diberikan calon debitur.

5. Balas Jasa

Balas jasa yang dimaksud ialah keuntungan yang akan diterima oleh Bank sebagai pihak yang memberikan kredit dari nasabah yang menerima kredit salah satu contohnya bunga kredit.

### Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit terdapat prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk menilai apakah kredit yang diberikan layak apa tidak. Prinsip tersebut terdiri dari 5C dan 7P diantaranya sebagai berikut :

1. Perinsip 5C

1) *Character*

Merupakan penilaian Bank terhadap watak atau sifat calon debitur, dimana hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah calon debitur bisa dipercaya atau tidak berdasarkan wawancara dan latar belakang dari calon debitur.

2) *Capacity*

Merupakan penilaian akan kemampuan calon debitur untuk menyelesaikan kreditnya. Penilaian ini berdasarkan kemampuan calon debitur dalam menghasilkan pendapatan agar dapat mengembalikan kredit yang akan disalurkan.

3) *Capital*

Merupakan penilain akan modal yang dimiliki calon dabitur. Bank tidak akan membiayai suatu usaha secara penuh, pihak calon debitur juga harus memiliki dana atau sumber modalnya sendiri.

4) *Colleteral*

Merupakan penilaian akan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan yang diberikan dapat bersifat fisik atau nonfisik dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan. Bank harus memastikan kebenaran dari jaminan yang diberikan oleh calon debitur untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi kelak.

5) *Condition*

Merupakan penilaian akan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi kelak diberbagai sektor. Bank harus mengetahui sektor-sektor ekonomi yang mengalami kenaikan maupu penurunan, untuk menghindari risiko yang akan terjadi nantinya.

2. Perinsip 7P

1) *Personality*

Merupakan penilaian akan kepribadian dan tingkah laku serta latar belakan dari calon debitur.

2) *Party*

Merupakan penggolongan kepada calon debitur berdasarkan jumlah modal yang dimiliki, karakternya, loyalitas dan sebagainya. Calon debitur akan digolongkan menjadi beberapa golongan dan akan menerima fasilitas kredit yang berbeda berdasarkan golongannya.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui apa tujuan calon debitur dalam mengajukan kredit agar mendapatkan jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhannya.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai apakah usaha yang dimiliki oleh calon debitur akan berkembang atau tidak. Hal ini untuk menghindari risiko kerugian yang akan dialami Bank maupun calon debitur nantinya.

5) *Payment*

Merupakan penilaian akan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang akan diberikan. Bank harus mengetahui sumber dana atau penghasilan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kreditnya agar Bank mengetahui apakah calon debitur layak apa tidak.

6) *Profitability*

Merupakan penilaian tentang kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba. Penilaian ini untuk melihat kecenderungan bagaimana laba yang dihasilkan oleh calon debitur apakah meningkat atau menurun.

7) *Protection*

Merupakan penilaian yang mengenai jaminan yang diberikan oleh pemohon. Jaminan pemohon yang diberikan digunakan sebagai perlindungan oleh Bank dari risiko kerugian saat nasabah gagal memenuhi kewajibannya.

### **Kredit Modal Kerja**

#### **Pengertian Kredit Modal Kerja**

Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan kepada peminjam dalam bentuk mata uang rupiah yang digunakan sebagai modal usaha pada suatu jenis usaha, biasanya kredit modal kerja memiliki jangka waktu hingga 1 tahun.

#### **Kegunaan Kredit Modal Kerja**

Banyak pelaku bisnis yang memiliki modal minim untuk mengembangkan usaha, dengan adanya kredit modal kerja yang disalurkan akan membuat mereka lebih mudah dan membuat usahanya menjadi lebih berkembang. Karena kredit modal kerja ditujukan untuk mendukung kemajuan usaha peminjam untuk usaha kecil dan menengah.

## **GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN**

### **Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) telah berdiri sejak 16 Oktober 1897 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam Koninklijk Besluit Nomor 27 (dua puluh tujuh) dikatakan bahwa Hindia Belanda telah mendirikan Postspaarbank di Batavia (sekarang dikenal dengan Jakarta) dengan tujuan yaitu mengedukasi masyarakat agar suka menabung dan memperkenalkan apa itu lembaga perbankan.

Pada tahun 1931 Postspaarbank terus mengalami peningkatan dalam mengimpun dana, tercatat pada akhir tahun 1939 dana yang dihimpun oleh Postspaarbank telah mencapai Rp. 54 juta yang didapatkan dari membungakan dana dari surat berharga. Pada tahun 1939 juga tercatat Postspaarbank telah memiliki 4 cabang di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Pada tahun 1940 saat terjadinya serangan Jerman kepada Netherland, dana senilai Rp. 11 juta ditarik oleh nasabah Postspaarbank, tapi setahun setelahnya kepercayaan nasabah kembali dan Postspaarbank mampu menghimpun dana kembali hingga mencapai Rp. 58,8 juta.

Pada tahun 1942 Postspaarbank dibekukan, hal tersebut merupakan dampak dari pengambilalihan kekuasaan kekuasaan kolonial Belanda oleh Jepang. Pada 1 april 1942 sebagai ganti Postspaarbank pemerintah Jepang membuat Tyokin Kyoku. Tetapi tidak seperti Postspaarbank, Tyokin Kyoku kurang berhasil menarik minat masyarakat dan hanya berhasil mendirikan sebuah cabang di Yogyakarta.

Setelah kemerdekaan Indonesia atas pendudukan Jepang, Tyokin Kyoku yang didirikan oleh pemerintah Jepang diambil alih Pemerintah RI yang kemudian dirubah namanya menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP).

Kantor Tabungan Pos berperan besar dalam pengerjaan penukaran uang Jepang dengan “Oeang Republik Indonesia” (ORI). Namun lembaga keuangan ini belum dapat menjalankan fungsinya secara lancar. Puncaknya adalah saat Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, menyebabkan Yogyakarta sebagai Ibukota RI jatuh ke tangan Belanda sehingga pemerintahan RI terganggu dan didudukinya semua kantor termasuk kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos hingga tahun 1949.

Bulan Juni 1949, Pemerintahan RI mengaktifkan lagi dan mengganti nama Kantor Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Pos Republik Indonesia untuk membereskan pekerjaan Kantor Tabungan Pos yang telah kocar-kacir. Penyerahan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 selanjutnya Pemerintahan RI hanya mengaku Bank Tabungan Pos RI sebagai lembaga tabungan yang diganti menjadi Bank Tabungan Pos pada tahun 1950.

Tahun 1950 perubahan terhadap Undang-Undang Postspaarbank (stbl N.I tahun 1934 No. 653). Isinya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta dan Postpaarbank di Indonesia menjadi Bank Tabungan Pos. Selain itu, pusat Pemerintahan RI sejak 27 Desember 1949 sudah kembali ke Jakarta dari Yogyakarta. Dan ditetapkannya Bapak S. Darmosoetanto sebagai pribumi pertama yang menduduki jabatan Direktur BTN merupakan titik baru bagi bangkitnya kelompok pribumi dalam dunia perbankan. Maka ditetapkan tanggal 9 Februari 1950 sebagai hari lahir Bank Tabungan Negara melalui Ketetapan Direksi No. 05/DIR/BIDIR/0993 tanggal 27 Desember 1993.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 36 tahun 1953 yang termuat dalam Lembaran Negara RI No. 86 tahun

1953, isinya mencabut Postspaarbank ordonantie dan Undang-Undang Darurat No. 9 tahun 1950. Selanjutnya Bank Tabungan Pos diganti Bank Tabungan Negara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1963 (Lembaran Negara No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963). Bank Tabungan Pos adalah badan hukum yang mempunyai cabang-cabang dan berada dibawah Kementrian Perhubungan. Berdasarkan Keppres No.94 tahun 1962, beralih dibawah Koordinasi Pengawasan Departemen Keuangan dibawah Menteri Urusan Bank Sentral.

Dalam usaha menata bidang moneter dan perbankan yang berdaya guna dan tepat guna. Pemerintah secara bertahap mengarahkan sruktur organisasi perbankan yang bersifat tunggal yang disebut “Program Ekonomi Perjuangan”. Dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1965 (Lembaran Negara RI No. 45 tahun 1965) ditetapkan pengintegrasian Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara kedalam Bank Sentral. Pengintegrasian Bank Tabungan Negara kedalam Bank Indonesia dikukuhkan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No.11 tahun 1965 (Lembaran Negara RI No. 57 tahun 1965).

Orde Baru berhasil mengatur kembali kehidupan perekonomian, maka lahirlah Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 ditetapkan Undang-Undang No. 20 tahun 1968 mengenai pendirian Bank Tabungan Negara. Tugas pokok Bank Tabungan Negara diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan.

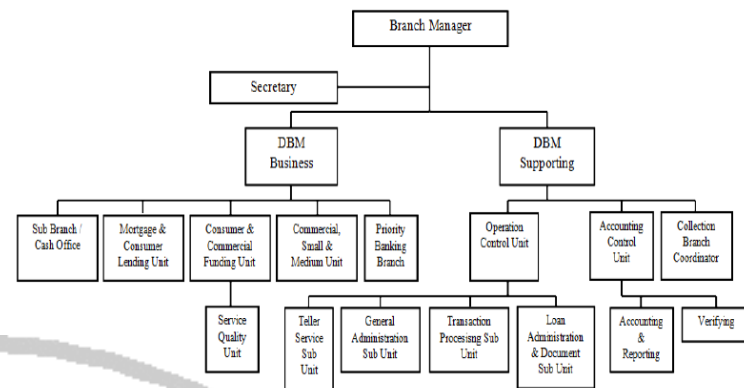
Tahun 1971 Bank Indonesia menciptakan bentuk tabungan baru yaitu TABANAS. Maksud dan tujuannya untuk menghimpun dana masyarakat sekecil mungkin guna mensukseskan

pembangunan nasional, sasarannya adalah seluruh lapisan masyarakat. Dengan lahirnya Tabanas berarti segala bentuk tabungan yang diselenggarakan Bank Tabungan Negara dihapuskan dan harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang.

Tahun 1974 pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah. Bank Tabungan Negara ditunjuk sebagai wadah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974. Bank Tabungan Negara mengemban tugas dibidang tabungan, pemberi kredit perumahan dengan bangunan rumah beserta tanah yang dibeli dari kredit.

Pada tahun 1976 ditandai sejarah realisasi KPR pertama kali di Semarang. Guna membiayai KPR, Bank Tabungan Negara mampu mengarahkan dana masyarakat. Peningkatan usaha penyediaan rumah melalui KPR-BTN dikembangkan atau program tabungan yang disebut Tabungan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (TUM-KPR) mendapat persetujuan dari Direksi Bank Indonesia. Maka pada Oktober 1989 Bank Tabungan Negara telah melaksanakan penerimaan simpanan dalam bentuk "Giro". Bank Tabungan Negara telah mencanangkan tiga sasaran pokok, yaitu sebagai bank milik Pemerintah, bank yang dicintai masyarakat dan bank yang disayangi karyawannya, serta memasyarakatkan budaya kerja yang disebut Panca Tertib, Tertib Arsip, dan Tertib Lingkungan. Pengenalan logo baru Bank Tabungan Negara berbentuk segi enam menyerupai bentuk sarang lebah serta menyiratkan semangat menabung.

Memasuki tahun 1992 terjadi perubahan mendasar dalam bentuk hukum Bank Tabungan Negara. Bentuk hukum Bank Tabungan Negara berubah menjadi Perusahaan Perseroan, dikenal dengan



sebutan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Pendirian PT. Bank Tabungan Negara didasarkan pada Akte Pendirian No. 136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH Notaris di Jakarta. Sehingga menjadikan gerak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) lebih leluasa. Maka sejak tanggal 1 Agustus 1992 bidang kegiatannya diperluas menjadi Bank Umum.

## Visi Dan Misi

Berikut merupakan visi dan misi yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya :

### A. Visi

Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

### B. Misi

1. Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia.
2. Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital.
4. Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki banyak integritas tinggi.

5. Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.
6. Memedulikan kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

### **Struktur Organisasi**

Berikut adalah sturuktur organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya.

**Gambar 4.1**

### **Struktur organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya**

#### **Job Description**

Berikut merupakan penjelasan mengenai Job Description pada Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya :

1. Branch manager
  - 1) Bertugas memimpin kantor cabang ditempat kedudukanya dan melakukan tugas berdasarkan perintah dan arahan direksi.
  - 2) Bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan secara berkala maupun insidentil dan laporan lainnya sehubungan denga fungsi kantor cabang.
  - 3) Mengelolaan harta kekayaan Bank dan seluruh kegiatan kantor cabang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan direksi.
  - 4) Mengawasi tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan dengan mengadakan evaluasi.
2. Secretary
  - 1) Mengatur segala aktivitas manajemen dan administrasinya

- bagi kepentingan manajemen cabang.
- 2) Membantu manajemen dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak luar.
- 3) Membantu mengerjakan surat-surat dan dokumen
3. Sub Branch / Cash office
  - 1) Mengawasi dan mengontrol setiap unit kerja dengan mengadakan pertemuan dengan kepala kerja unit kerja secara rutin.
  - 2) Memeriksa neraca dan laba rugi.
  - 3) Membantu dan mengawasi pelaksanaan transaksi.
  - 4) Mematikan setiap unit kerja mencapai target pekerjaannya.
4. Deputy Branch Manager (DBM) Businnes
  - 1) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah (PBI No.3/10/PBI/2001).
  - 2) Bertanggung jawab mewakili atas pelaksanaan otoritas sesuai batas kewenangan.
  - 3) Bertanggung jawab mewakili atas pengelolaan resiko bisnis, baik yang dilakukan oleh Cabang, Kantor Pembantu Cabang, Kantor Kas.
  - 4) Bertanggung jawab mewakili atas kebenaran laporan checklist kepatuhan dan manajemen resiko.
  - 5) Bertanggung jawab mewakili atas aktivitas yang menyakut Manajemen Teknologi Sistem Informasi di Kantor Cabang termasuk password cadangan.
  - 6) Bertanggung jawab mewakili atas seluruh aktivitas yang menyangkut Manajemen Teknologi Sistem Informasi (MTSI) di Kantor Cabang termasuk password cadangan.
  - 7) Bertanggung jawab mewakili atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang menyangkut operasional Bank baik intern ataupun ekstern.
  - 8) Bertanggung jawab mewakili atas Branch Security Officer Kantor Cabang.

- 9) Bertanggung jawab mewakili atas terselenggaranya Good Corporate Government.
  - 10) Bertanggung jawab mewakili atas opening dan Closing Branch.
  - 11) Bertanggung jawab mewakili atas penetapan target dana, kredit, feebased, dan penetapan anggaran cadangan secara keseluruhan.
  - 12) Bertanggung jawab mewakili atas pencapaian target dana, kredit, feebased, dan peningkatan penggunaan fitur produk.
  - 13) Bertanggung jawab mewakili atas peningkatan peran bisnis Cabang, Kantor Pembantu Cabang, Kantor Kas yang berorientasi pada profit yang optimal.
  - 14) Bertanggung jawab mewakili atas pemenuhan kompetensi dan pegawai yang dibawahahi.
  - 15) Bertanggung jawab mewakili atas melakukan perencanaan, bimbingan dan pembinaan serta penilaian kepada pegawai yang dibawahahi.
  - 16) Bertanggung jawab mewakili atas pengamanan asset Bank di wilayah kerja yang dibawahahi.
5. Service quality
- 1) Memastikan pemberian Quality Service Level pada nasabah.
  - 2) Meningkatkan Quality Service Level terhadap nasabah untuk outlet dibawah Kantor Cabang.
  - 3) Membuat laporan Quality Service Level kepada unit terkait di Kantor Pusat.
6. Customer service
- 1) Melakukan pelayanan informasi mengenai perbankan kepada masyarakat.
  - 2) Memberikan pelayanan terhadap nasabah yang datang maupun melalui telepon.
  - 3) Melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan.
  - 4) Melakukan pelayanan administrasi yang berkaitan baik produk ataupun jasa yang dimiliki Bank BTN.
- 5) Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening.
  - 6) Melakukan pelayanan penyelesaian incoming transfer.
  - 7) Melayani informasi PPh bunga produk dana.
  - 8) Melayani percetakan R/K (Eksternal) KPR dan Non KPR.
  - 9) Melakukan pendebetan buku tabungan.
  - 10) Melakukan maintenance kepada nasabah.
  - 11) Melakukan monitoring atas update rate counter dan ketersediaan brosur.
  - 12) Melakukan maintenance kode BI di sistem SIB.
  - 13) Pemeliharaan aplikasi nasabah dana dan feebase.
  - 14) Melakukan pemeliharaan user ID (BSO2) dikantor cabang pembantu.
7. Operation Unit
- 1) Melakukan supervisi atas fungsi Teller Service.
  - 2) Melakukan supervisi atas fungsi Transaction Processing.
  - 3) Melakukan supervisi atas fungsi Branch Administration.
  - 4) Melakukan supervisi atas fungsi Loan Administration.
8. Teller Service Sub Unit
- 1) Melakukan administrasi kas.
  - 2) Melayani transaksi angsuran KPR dan Non KPR.
  - 3) Melayani transaksi giro.
  - 4) Melayani transaksi tabungan.
  - 5) Melayani transaksi deposito.
  - 6) Melayani transaksi offline.
  - 7) Melayani transaksi rupa – rupa kas.
  - 8) Melayani transaksi kiriman uang.
  - 9) Melayani transaksi collection.
  - 10) Melayani transaksi inkaso.
  - 11) Melayani transaksi payment point (SOPP).
  - 12) Melayani transaksi host to host (Telkom, PLN, dll).
  - 13) Melayani transaksi lainnya.
  - 14) Melayani transaksi pajak on-line.

- 15) Melakukan pengisian kas ATM dan pemeriksaan kas ATM (Cash Opname).
  - 16) Penyampaian laporan kepada atasannya bila ada transaksi yang mencurigakan yang terkait sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang anti pencurian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT).
9. General Administration Sub Unit
- 1) Memantau anggaran biaya dan belanja pegawai di kantor cabang.
  - 2) Bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan semua inventaris cabang setiap saat.
  - 3) Memastikan file kepegawaian di administrasikan secara efektif dan efisien.
10. Loan Administration & Document Sub Unit
- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen atas kredit
  - 2) Mengarsipkan dokumen-dokumen atas kredit yang masuk.
  - 3) Menginput dokumen-dokumen yang masuk kedalam sistem.
  - 4) Menyerahkan dokumen atas kredit yang telah lunas ke bagian pelunasan.
  - 5) Bertanggung Jawab atas pelaksanaan OTS (on the spot ) kelayakan usaha dan penghasilan calon debitur.
  - 6) Bertanggung Jawab atas pelaksanaan taksasi nilai dan kehandalan agunan LPA (Laporan Penilaian Akhir) melalui jasa appraisal.
  - 7) Bertanggung Jawab atas proses administrasi dan penerbitan Bank Garansi.
  - 8) Bertanggung Jawab atas proses pengelolaan pencairan dana jaminan.
  - 9) Bertanggung Jawab atas pengelolaan pencairan dana notaris dan appraisal atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Bank.
- 10) Bertanggung Jawab atas penyelesaian klaim debitur di sistem.
  - 11) Bertanggung Jawab atas proses restrukturisasi kredit kedalam sistem.
  - 12) Bertanggung Jawab atas pembentukan ID kolektor kedalam sistem. Bertanggung Jawab atas proses update dana statis debitur sesuai dengan ketentuan Bank. Bertanggung Jawab atas informasi kredit yang diperlukan oleh pihak yang berwenang.
  - 13) Bertanggung Jawab atas proses rekonsiliasi Sub Ledger, General Ledger dana jaminan.
  - 14) Bertanggung Jawab atas Proses seleksi dan penunjukan rekanan Bank yang berhubungan dengan kredit sesuai ketentuan Bank.
  - 15) Bertanggung Jawab atas administrasi kredit kelolaan atau kredit program jika ada.
11. Accounting dan Reporting
- 1) Membuat dan Menyampaikan laporan keuangan dan laporan manajemen kantor cabang.
  - 2) Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk pihak ekstern.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penilitan yang dilakukan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya, dapat diketahui bahwa Kredit Modal Kerja pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya ditunjukan kepada badan usaha berbadan hukum maupun non hukum untuk kebutuhan modal kerja. Dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sedangkan untuk PRK adalah 12 (dua belas) bulan. Nilai maksimal pembiayaan yang diberikan dalam Kredit Modal Kerja adalah 80% dari kebutuhan modal dan untuk badan usaha non hukum maksiamal kredit yang



diberikan sebesar Rp. 10 milyar (sepuluh miliar rupiah). Suku bunga yang berlaku ditetapkan sesuai dengan suku bunga Bank yang berlaku. Sedangkan untuk nilai jaminan yang harus dipenuhi adalah senilai 125% dari nilai plafond kredit. Adapun biaya provisi yang dikenakan adalah sebesar 1% dari nilai plafond kredit. Untuk keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 2% di atas tingkat suku bunga yang berlaku dan diperhitungkan atas jumlah tunggakan tersebut, dari tanggal penagihan sampai dengan tanggal pembayaran atas tunggakan dimaksud.

Berikut merupakan contoh kasus sederhana dari pengajuan kredit modal kerja :

Perusahaan X membutuhkan dana sebesar Rp. 75.000.000,- untuk keperluan pembelian mesin baru. Pemilik Perusahaan X mengajukan Kredit modal Kerja ke Bank untuk mendapatkan pembiayaan.

Pemilik Perusahaan X terlebih dahulu datang menemui CS yang selanjutnya akan diarahkan untuk bertemu dengan AO guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kredit yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan X. AO akan meminta pemilik Perusahaan X untuk mengisi formulir pengajuan kredit serta melengkapi dokumen terkait dengan identitas pemilik serta legalitas akan usahanya dan juga dokumen lainnya sesuai dengan yang disyaratkan. AO juga akan melakukan wawancara guna mendapatkan informasi lebih detail mengenai pemohon.

AO kemudian akan memberikan berkas pemohon kepada Commercial Loan Analyst untuk dilakukan analisa lebih dalam serta membuatkan rekomendasi kredit yang akan diberikan. Jika Perusahaan X membutuhkan dana sebesar Rp. 75.000.000,- maka sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu pembiayaan maksimal ialah 80% dari kebutuhan modal kerja, kredit maksimal yang direkomendasikan ialah senilai Rp. 60.000.000,-. Kemudian

mengenai agunan yang dijaminan oleh pemilik Perusahaan X terhadap jumlah kredit yang diajukan. Sesuai ketentuan yang berlaku, agunan harus bernilai 125% dari kredit yang diajukan. Jika Perusahaan X mendapatkan kredit senilai Rp. 60.000.000,- maka nilai agunan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan X ialah 125% dari Rp. 60.000.000,- atau senilai Rp. 75.000.000,-. Setelah dilakukan analisa dan dibuatkan rekomendasi kredit yang akan diberikan maka rekomendasi tersebut akan diajukan kepada komite kredit selaku pemutus.

Komite kredit akan menilai apakah kredit yang diajukan oleh Perusahaan X layak diberikan atau tidak berdasarkan analisa dan rekomendasi oleh Commercial Loan Analyst. Jika diterima maka selanjutnya Perusahaan X akan diberikan surat SP2K yang berisi mengenai tawaran kredit serta syarat dan ketentuannya. Jika Perusahaan X setuju selanjutnya akan dilakukan peninjauan mengenai kredit tersebut dan setelahnya dilakukan realisasi atau akad.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan pembayaran nilai angsuran yang harus dipenuhi jika kredit tersebut telah berjalan.

Jika bunga yang berlaku saat itu adalah 0,9% per bulannya, dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 1 tahun, maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Perusahaan X setiap bulannya adalah sebagai berikut :

Angsuran pokok =  $\text{Rp. 60.000.000,-} / 12 \text{ bulan} = \text{Rp. 5.000.000,-}$

Bunga =  $\text{Rp. 60.000.000,-} \times 0,9\% = \text{Rp. 540.000,-}$

Jadi total angsuran yang harus dibayarkan oleh Perusahaan X setiap bulannya ialah Rp. 5.540.000,-

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang memberikan jasa dan layanan keuangan kepada masyarakat yang kegiatan utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank ialah Kredit Modal Kerja. Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan kepada peminjam dalam bentuk mata uang rupiah yang digunakan sebagai modal usaha pada suatu jenis usaha, biasanya kredit modal kerja memiliki jangka waktu hingga 1 tahun.

Kredit Modal Kerja pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya ditujukan untuk badan usaha berbadan hukum maupun non hukum untuk membiayai kebutuhan modal kerja sebesar 80% dari kebutuhan modal kerja dan maksimal Rp. 10 milyar (sepuluh miliar rupiah) untuk PRK dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan untuk KMK BTN dan 12 (dua belas) bulan untuk PRK.

Untuk prosedur pengajuan Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seperti kartu identitas, legalitas usaha, foto pemohon, laporan keuangan dan sebagainya sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan. Persyaratan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan kredit layak diberikan atau tidak serta

sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam perjanjian kredit.

Selain sebagai salah satu kegiatan utama Bank yang memberikan pendapatan dari bunga yang diberikan kredit juga mempunyai risiko bagi Bank. Untuk mencegah terjadinya risiko yang dapat merugikan maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya mempunyai ketentuan seperti menetapkan denda untuk keterlambatan pembayaran sebesar 2% di atas tingkat suku bunga yang berlaku dan diperhitungkan atas jumlah tunggakan tersebut, dari tanggal penagihan sampai dengan tanggal pembayaran atas tunggakan dimaksud, hal ini guna mencegah nasabah lalai dari kewajibannya. Selain itu terdapat risiko gagal bayar oleh nasabah yang dimana untuk mencegah itu maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya akan melakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi nasabah seperti penjadwalan ulang, persyaratan ulang, penataan kembali ataupun kombinasi dari tindakan tersebut. Dan juga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya menetapkan agunan sebesar 125% dari nilai plafond kredit yang akan dilelang apabila nasabah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya.

### Saran

Saran ini ditujukan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi kedepannya. Oleh karena itu, disarankan :

1. Apabila penelitian akan dilakukan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya mohon diperbanyak menggali sumber data dan informasi agar menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat.
2. Apabila penelitian yang dilakukan merujuk judul yang sama maka hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan

dan di tingkatkan lagi agar menjadi lebih baik.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian Kredit Modal Kerja pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kantor cabang Surabaya, agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi serta untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bank dapat memberikan saran dalam proses pengajuan kredit oleh calon debitur, seperti memberi saran mengenai kredit yang sesuai dengan kebutuhan calon debitur maupun hal-hal yang berkaitan dengan keperluan pengajuan kredit itu sendiri, seperti jenis agunan yang tepat agar persyaratan kredit terpenuhi.
2. Bank harus lebih memperhatikan mengenai dokumen dan informasi terkait pemohon kredit. Bank harus memastikan kebenaran dari dokumen dan informasi yang diberikan guna mencegah risiko yang akan terjadi.
3. Bank dapat meningkatkan pelayanannya lagi seperti memberikan pemberitahuan kepada nasabah mengenai waktu jatuh tempo pembayaran kewajiban.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2013. Manajemen Pemasaran. cet. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Buku pedoman Tugas Akhir D3 STIE PERBANAS Surabaya. 2019. Surabaya

Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Landasan Hukum Perbankan. 2019. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Diakses pada tanggal 7 Maret 2019.

Pengertian Bank Indonesia. 2019. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Diakses pada tanggal 19 april 2019.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Online), ([www.btn.co.id](http://www.btn.co.id), diakses 3 Maret 2019)

Punaji, S. (2010). Metode penelitian pendidikan dan pengembangan. Jakarta: kencana.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.